

Implementasi Kebijakan Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Di Kabupaten Bojonegoro

¹Vira Virnanda, ²Sri Minarti

^{1,2}Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, Indonesia

Correspondence Email/WA: viravirnanda200@gmail.com

Abstract: *This research examines the implementation of policies carried out by the Department of Education in improving the professionalism of Islamic Religious Education (PAI) teachers in Bojonegoro Regency. PAI teachers have a strategic responsibility in developing students' character, ethics, and religious values, making professional competence an essential requirement in responding to educational transformation and technological advancement in the contemporary era. This study applied a descriptive qualitative method with a policy analysis framework. The data were obtained through in-depth interviews with officials of the Education Department, PAI supervisors, school principals, and PAI teachers, supported by documentation studies related to educational development programs and policies. The findings demonstrate that the Department of Education of Bojonegoro Regency has introduced several strategic programs, including strengthening Teacher Working Groups (KKG) and Subject Teacher Deliberation Forums (MGMP), conducting continuous professional development training, and improving teacher distribution across educational institutions. Nevertheless, policy implementation continues to face several challenges, such as inadequate budget allocation specifically for PAI teacher development, weak coordination between the Education Department and the Ministry of Religious Affairs, and differences in digital literacy among senior teachers. Therefore, this study emphasizes the necessity of strengthening institutional cooperation and integrating technology-based professional development programs to support the equitable enhancement of PAI teacher professionalism.*

Keywords: *Policy Implementation, Education Department, Professionalism, Islamic Religious Education Teachers*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan aspek penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dan memiliki karakter yang baik. Dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki fungsi yang sangat strategis karena tidak hanya berperan dalam proses penyampaian pengetahuan, tetapi juga dalam pembentukan akhlak, moral, dan nilai-nilai keagamaan peserta didik. Oleh karena itu, guru PAI dituntut memiliki

profesionalisme yang tinggi agar mampu menghadapi perkembangan zaman, khususnya di era digital dan perubahan sosial yang semakin dinamis (Anjarsari & Susanto, 2019).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa guru merupakan tenaga profesional yang bertugas mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Profesionalisme tersebut tercermin melalui penguasaan kompetensi pedagogik, sosial, profesional, dan kepribadian. Akan tetapi, implementasi peningkatan kompetensi guru di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah kendala, baik yang bersifat administratif maupun budaya kerja (Darmawan, 2020).

Kabupaten Bojonegoro memiliki tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru PAI. Luas wilayah dan kondisi sosial masyarakat yang beragam menyebabkan kualitas pendidikan di beberapa daerah belum merata. Selain itu, dualisme pembinaan guru PAI antara Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama sering menimbulkan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan mutu guru (M.Zamroni,ST, 2026b) .

Dalam situasi tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro memiliki tanggung jawab untuk menyusun kebijakan yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas guru PAI. Berbagai program dilakukan melalui pelatihan kompetensi, penguatan komunitas guru, pemerataan distribusi tenaga pendidik, serta penyediaan fasilitas pembelajaran. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan profesionalisme guru PAI serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya.

METHODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi kebijakan peningkatan profesionalisme guru PAI di Kabupaten Bojonegoro. Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro serta beberapa sekolah yang menjadi objek penelitian (Sari, 2024). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan utama, seperti pejabat bidang ketenagaan Dinas Pendidikan, pengawas PAI, pengurus KKG dan MGMP PAI, serta guru PAI yang berstatus ASN, PPPK, maupun honorer. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, laporan kegiatan pelatihan, data persebaran guru, serta regulasi yang berkaitan dengan pengembangan tenaga pendidik (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024). Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara simultan. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara dan dokumen yang relevan (Spradley & Huberman, 2024) .

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Kompetensi Guru PAI

1. Implementasi Kebijakan Dinas Pendidikan dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru PAI melalui Aspek Komunikasi

Aspek komunikasi menjadi unsur penting dalam implementasi kebijakan peningkatan profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh efektivitas penyampaian informasi kepada para pelaksana di lapangan. Untuk itu, Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi, koordinasi, serta penyebaran informasi melalui rapat, seminar, pelatihan, workshop, surat edaran, dan media digital agar guru memahami kebijakan yang berlaku dengan baik (Nugroho, 2023). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Zamroni, ST., MM salah satu Pegawai Dinas Pendidikan menyampaikan:

“Kami selalu berupaya menyampaikan informasi terkait program peningkatan profesionalisme Guru PAI secara jelas dan berkelanjutan. Sosialisasi dilakukan melalui rapat, surat resmi, grup WhatsApp, serta kegiatan MGMP dan KKG agar seluruh guru memperoleh informasi yang sama dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan program.”



Gambar 1 Pembinaan Guru dan tenaga kependidikan

Selanjutnya, terkait upaya koordinasi dalam pelaksanaan program, beliau menyampaikan:

“Selain melakukan sosialisasi, kami juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama, pengawas PAI, dan pihak sekolah. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan setiap program peningkatan profesionalisme Guru PAI dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.”

Koordinasi antara Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan sekolah menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi kebijakan. Melalui koordinasi yang baik, setiap pihak dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara optimal dalam mendukung peningkatan kualitas profesional Guru PAI. (Suprpto, 2018)

Selanjutnya, Penyampaian informasi mengenai berbagai program pengembangan profesi, seperti pelatihan, seminar, lokakarya, dan sertifikasi, dilakukan melalui berbagai media komunikasi agar seluruh guru memiliki akses informasi yang cepat dan merata (Apriliani & Hariyati, 2024). Dengan demikian, komunikasi yang efektif melalui sosialisasi, koordinasi, dan penyampaian informasi yang jelas menjadi faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan dalam meningkatkan profesionalisme Guru PAI. (Wahyu & Hariyati, 2024)

2. Implementasi Kebijakan Dinas Pendidikan dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru PAI melalui Aspek Sumber Daya

Aspek sumber daya memiliki peran penting dalam mendukung implementasi kebijakan peningkatan profesionalisme Guru PAI. Ketersediaan anggaran menjadi faktor utama dalam pelaksanaan berbagai program pengembangan kompetensi, seperti pelatihan,

workshop, seminar, bimbingan teknis, KKG, dan MGMP. Anggaran yang memadai memungkinkan program berjalan secara optimal dan berkelanjutan.(Sekda, 2021)

Selain itu, keberadaan tenaga pelatih dan narasumber yang kompeten, seperti pengawas pendidikan, dosen, praktisi pendidikan, dan instruktur profesional, turut mendukung peningkatan pengetahuan serta keterampilan guru PAI sesuai dengan kebutuhan pendidikan saat ini. (Purnomo, n.d.) Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M.Zamroni, ST.,MM salah satu Pegawai Dinas Pendidikan menyampaikan:

“Kami menyediakan dukungan sumber daya yang memadai untuk meningkatkan kompetensi Guru PAI, baik melalui anggaran kegiatan pelatihan, KKG, dan MGMP, maupun penyediaan narasumber yang kompeten.”

Lebih lanjut, terkait pemanfaatan teknologi dalam pengembangan profesional guru, beliau menjelaskan:

“Selain dukungan anggaran dan narasumber, pemanfaatan teknologi melalui pelatihan daring dan webinar terus dikembangkan untuk mendukung pengembangan profesional guru secara lebih efektif.”

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Kementerian Agama memberikan dukungan sumber daya yang memadai untuk meningkatkan kompetensi Guru PAI melalui penyediaan anggaran pelatihan, kegiatan KKG dan MGMP, serta narasumber yang kompeten. Dukungan tersebut menunjukkan komitmen dalam mendorong peningkatan profesionalisme guru secara berkelanjutan. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga terus dikembangkan melalui pelatihan daring dan webinar sebagai sarana pengembangan kompetensi yang lebih fleksibel. Dengan adanya dukungan sumber daya dan teknologi, proses pengembangan profesional Guru PAI dapat berlangsung lebih efektif dan menjangkau lebih banyak peserta. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi melalui pelatihan online, webinar, dan platform pembelajaran digital membantu Guru PAI meningkatkan kompetensi serta memperluas kolaborasi profesional(Hamzah & Mudlofir, 2025).

3. Implementasi Kebijakan Dinas Pendidikan dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru PAI melalui Aspek Disposisi atau Komitmen Pelaksana

Keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh aspek disposisi atau komitmen para pelaksana. Komitmen pejabat Dinas Pendidikan tercermin dalam upaya yang berkelanjutan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program peningkatan profesionalisme guru PAI sesuai dengan kebutuhan di lapangan (M. Zamroni, ST, 2026b).

Pada tingkat sekolah, kepala sekolah menunjukkan komitmennya dengan memberikan dukungan kepada guru PAI untuk mengikuti berbagai kegiatan pengembangan profesi, seperti pelatihan, seminar, dan MGMP. Berdasarkan hasil wawancara kepala sekolah MA Sunan Ampel Tanjungharjo Bapak Drs. Ahmad Nur Sholikin menyampaikan:

“Sekolah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada guru PAI untuk mengikuti pelatihan, seminar, workshop, maupun kegiatan MGMP. Kami memahami bahwa peningkatan kompetensi guru akan berdampak langsung pada kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik.”



Gambar 2 Kegiatan MGMP

Sementara itu, guru PAI pada umumnya memiliki motivasi yang tinggi untuk mengikuti program pengembangan profesi karena menyadari pentingnya peningkatan kompetensi dalam menunjang kualitas pembelajaran. Meskipun demikian, beberapa guru masih menghadapi kendala berupa keterbatasan waktu dan tingginya beban administrasi yang dapat memengaruhi partisipasi mereka dalam kegiatan pengembangan profesional. Berdasarkan hasil wawancara oleh Ibu Dra. Hj. Retyo Yuli Pancaiswati, M.Pd.I menyampaikan:

“Saya selalu berusaha mengikuti kegiatan pelatihan, workshop, maupun MGMP karena kegiatan tersebut memberikan banyak wawasan baru yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Sebagai guru, kami harus terus belajar agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan pendidikan saat ini.



Gambar 3. Kegiatan Workshop Peningkatan Kompetensi Guru

Namun demikian, beliau juga mengungkapkan adanya beberapa kendala yang dihadapi guru dalam mengikuti kegiatan pengembangan profesi. Kepala sekolah saat diwawancara menyampaikan bahwa

“Motivasi guru sebenarnya cukup tinggi, tetapi terkadang terkendala oleh keterbatasan waktu karena harus membagi antara tugas mengajar, administrasi pembelajaran, serta kegiatan lainnya di sekolah. Kondisi ini kadang membuat guru kesulitan mengikuti seluruh program yang diselenggarakan.”

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa motivasi guru dalam meningkatkan kompetensi dan mengikuti program pengembangan diri tergolong tinggi. Guru memiliki keinginan yang kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dapat menunjang profesionalismenya. Namun, partisipasi tersebut sering terkendala oleh keterbatasan waktu akibat banyaknya tanggung jawab yang harus dijalankan. Beban tugas

mengajar, administrasi pembelajaran, serta kegiatan sekolah lainnya menjadi faktor utama yang membatasi keterlibatan guru dalam seluruh program yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan waktu yang lebih efektif serta dukungan kebijakan yang memberikan ruang bagi guru untuk mengikuti program pengembangan kompetensi secara optimal.

4. Implementasi Kebijakan Dinas Pendidikan dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru PAI melalui Aspek Struktur Birokrasi

Dalam implementasi kebijakan peningkatan profesionalisme Guru PAI, aspek struktur birokrasi tercermin dari mekanisme pelaksanaan program yang disusun secara sistematis mulai dari perencanaan kegiatan seperti pelatihan, workshop, MGMP, sertifikasi, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan hingga pelaksanaan dan tindak lanjut program untuk meningkatkan kompetensi guru. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M.Zamroni, ST.,MM salah satu Pegawai Dinas Pendidikan menyampaikan:

“Setiap program peningkatan profesionalisme Guru PAI dilaksanakan melalui tahapan yang jelas, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.”

Selanjutnya, terkait tujuan dari mekanisme tersebut, beliau menjelaskan:

“Dengan mekanisme yang terstruktur tersebut, program peningkatan profesionalisme Guru PAI dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.”

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa program peningkatan profesionalisme Guru PAI dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Mekanisme yang terstruktur tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan setiap program pengembangan kompetensi guru. Adanya tahapan yang jelas membantu memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, program peningkatan profesionalisme Guru PAI dapat berlangsung secara lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan. Informasi program kemudian disampaikan kepada sekolah melalui pengawas PAI, koordinator wilayah, dan kepala sekolah agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai tujuan dan teknis yang telah ditetapkan.(Andika & Pramudiana, 2023)

Pelaksanaan program tersebut didukung oleh pembagian tugas dan wewenang yang jelas dalam struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Kepala Dinas Pendidikan bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan, bidang tenaga pendidik mengelola aspek teknis pelaksanaan program, sedangkan pengawas PAI berperan dalam pembinaan, supervisi, dan pengawasan implementasi program di sekolah.(Handoko et al., 2020)

Untuk memastikan seluruh program berjalan efektif dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pengawas PAI dan Dinas Pendidikan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang muncul selama pelaksanaan program, menilai tingkat keberhasilan kegiatan, serta memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dengan rencana yang telah ditetapkan.(Jannah & Nafi'ah, 2025)

B. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Kebijakan

Secara umum, tantangan implementasi kebijakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro meliputi keterbatasan SDM, ketidakmerataan sarana prasarana, masalah akses pendidikan, rendahnya partisipasi masyarakat, kelemahan data dan tata kelola, koordinasi antarinstansi, serta hambatan dalam pelaksanaan program beasiswa dan pendidikan inklusi. Untuk mengatasi hambatan tersebut diperlukan peningkatan kualitas tenaga pendidik, pemerataan fasilitas pendidikan, penguatan sistem informasi pendidikan, optimalisasi koordinasi antar pemangku kepentingan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung program pendidikan(Primadhayanti, 2022).

Selain itu, kesenjangan kemampuan digital di kalangan guru senior juga menjadi tantangan yang cukup besar. Sebagian guru masih mengalami kesulitan dalam menggunakan platform pembelajaran berbasis teknologi sehingga pelatihan yang diberikan belum sepenuhnya efektif.

Kendala lainnya adalah keterbatasan anggaran khusus untuk pengembangan guru PAI. Dana peningkatan mutu pendidikan harus dibagi dengan berbagai bidang lain sehingga dukungan pembiayaan khusus bagi guru PAI masih relatif terbatas. Berdasarkan hasil

wawancara dengan Bapak M.Zamroni, ST.,MM salah satu Pegawai Dinas Pendidikan menyampaikan:

"Dana peningkatan mutu pendidikan harus dibagi dengan berbagai bidang lain sehingga dukungan pembiayaan khusus bagi pengembangan Guru PAI masih relatif terbatas."

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa alokasi dana untuk peningkatan mutu pendidikan harus didistribusikan ke berbagai bidang yang menjadi prioritas lembaga. Kondisi tersebut menyebabkan dukungan pembiayaan yang secara khusus diperuntukkan bagi pengembangan profesionalisme Guru PAI masih terbatas. Keterbatasan anggaran ini berpotensi memengaruhi pelaksanaan program pengembangan kompetensi guru secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan dan prioritas anggaran yang tepat agar kebutuhan pengembangan Guru PAI tetap dapat terpenuhi.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan profesionalisme guru PAI telah berjalan dengan cukup baik melalui penguatan peran KKG dan MGMP, pelaksanaan pelatihan kompetensi, serta fasilitasi administrasi sertifikasi guru. Kebijakan tersebut memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pedagogik dan profesional guru PAI. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi sejumlah kendala, seperti lemahnya koordinasi dengan Kementerian Agama, keterbatasan anggaran, dan rendahnya kemampuan teknologi sebagian guru senior. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama antarlembaga, penyusunan sistem pembiayaan yang lebih terintegrasi, serta pengembangan program pendampingan digital berbasis kolaborasi antar-guru guna menciptakan peningkatan profesionalisme guru PAI yang lebih merata dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Andika, A. R., & Pramudiana, I. D. (2023). Implementasi Kebijakan Tunjangan Profesi Guru Di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. *Soetomo Magister Ilmu Administrasi*, 1(2), 111–124.
- Anjarsari, P., & Susanto, H. (2019). Reconstruction of Islamic Education (Study of Islamic

- Education Thoughts of Prof. Dr. Muhaimin, M.A.). *At-Ta'dib*, 14(1), 53.
<https://doi.org/10.21111/at-tadib.v14i1.3260>
- Apriliani, N. W., & Hariyati, N. (2024). PENGARUH PENGUASAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN MOTIVASI PENGEMBANGAN PROFESIONAL GURU TERHADAP KUALITAS PEMBELAJARAN PADA KURIKULUM MERDEKA DI SMP NEGERI KECAMATAN BOJONEGORO. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 12(1), 41–55.
- Darmawan, C. (2020). Implementasi Kebijakan Profesi Guru Menurut Undang. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 61–68.
https://www.researchgate.net/publication/348560528_IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_PROFESI_GURU_MENURUT_UNDANG-UNDANG_REPUBLIK_INDONESIA_NOMOR_14_TAHUN_2005_TENTANG_GURU_DAN_DOSEN_DALAM_PERSPEKTIF_HUKUM_PENDIDIKAN
- Dra.Retyo Yuli Pancaiswati M.Pd.l. (2026). *Motivasi guru PAI dalam mengikuti program pengembangan profesi*. Hasil wawancara tentang komitmen Guru PAI.
- Drs. Ahmad Nur Sholikin Kepala Sekolah. (2026). *implementasi kebijakan peningkatan profesionalisme guru PAI*. Hasil wawancara tentang komitmen kepala sekolah.
- Hamzah, A., & Mudlofir, A. (2025). Menukik Tantangan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pengembangan Kuriukulum Berbasis Teknologi Pada Era Society 5.0. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(3), 2659–2669.
- Handoko, N. T., Indrawati, M., & Muninghar, M. (2020). Struktur Organisasi, Desain Kerja, Budaya Organisasi dan Pengaruhnya Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Mitra Manajemen*, 4(5), 761–773.
- Jannah, D. M., & Nafi'ah, B. A. (2025). Analisis Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keberhasilan Peningkatan Daya Saing UMKM Oleh UPT BALAI LATIHAN dan PENGEMBANGAN TENAGA KERJA (BLP2TK) Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(8. D), 260–287.
- M.Zamroni,ST, .MM Sekretaris dinas. (2026a). *Implementasi Kebijakan Dinas Pendidikan dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru PAI melalui Aspek Struktur Birokrasi*.

- M.Zamroni,ST, .MM Sekretaris dinas. (2026b). *Program pengangkatan PPPK*. Hasil wawancara tentang implementasi kebijakan.
- Nugroho, A. P. (2023). Evaluasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. *Soetomo Magister Ilmu Administrasi*, 565–574.
- Primadhayanti, G. (2022). *Implementasi Kebijakan Satu Data Bojonegoro Dalam Mendukung Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur*. INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.
- Purnomo, H. (n.d.). KOMPETENSI PELATIH/NARASUMBER. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Tantangan Dan Solusi*, 75.
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). *No Title 濟無No Title No Title No Title*. 2, 306–312.
- Sari, A. R. (2024). Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal EQUILIBRIUM*, 5(January), 1–7.
- Sekda. (2021). Perda Kabupaten Bojonegoro. In *Peraturan.Bpk.Go.Id* (pp. 399–405).
- Spradley, P., & Huberman, M. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif : جاتنلًا زاترحلًا نع إطلخا في سايقلًا ءاطلخاو نوكي نم ينتهج لولوا نم هيج قدالما يهو اما .تيحنا نعلما لنا نا لاق اماو نم قيحنا نعلما نأبف سبتلت قيضق قدساف قيضقب ققداص بجاولا نم قحص . *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1(2), 77–84.
<https://pub.nuris.ac.id/journal/jomaa/article/view/93>
- Suprpto, S. (2018). Kebutuhan Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah. *Edukasi*, 16(2), 294465.
- Wahyu, A. N., & Hariyati, N. (2024). Pengembangan Profesional Guru Terhadap Kualitas. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Special Issue*, 07(001), 285.